



Politisi Solid Usung Hak Angket

Kantongi Bukti Upaya Suap Rp 12 Triliun

TEKAD mengajukan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta seandainya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Meski demikian sebagian besar kalangan politisi di Kebon Sirih menyatakan sikap untuk mengawal terwujudnya hak angket atas berbagai kebijakan yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sikap kalangan dewan itu sekaligus menampik keraguan dari sejumlah kalangan bahwa hak angket sekadar 'gertak sam-bal'. "Saya jamin, 10 anggota Fraksi Hanura tidak akan mundur, tidak akan bergeming. Kami semua sudah menandatangani surat dukungan hak angket," ujar Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Fahmi Zulfikar saat acara diskusi di DPRD DKI Jakarta, lusa (18/2) lalu.

Menurut Fahmi, tugas anggota dewan bersikap kritis terhadap setiap persoalan yang menyangkut uang rakyat. Dalam kasus APBD 2015, terindikasi dugaan suap kepada DPRD DKI oleh kalangan birokrat sebesar Rp 12 triliun. Ini tentunya dianggap sebagai bentuk penyimpangan.

Sehingga harus ditindaklanjuti dengan pengajuan hak angket. "Dokumen siluman APBD itu masalah serius. Itu uang rakyat bukan uang APBD. Jadi, Ahok harus bertanggungjawab kenapa ada dana siluman 12 triliun rupiah di APBD tahun ini," ungkap Fahmi.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung). Ia menegaskan, selama ini Ahok selalu menuduh bahwa dewan sebagai pelaku korupsi. Namun tuduhan itu tidak pernah disertai bukti. Dengan kata lain, hanya berujung pada fitnah.

Setelah kemunculan kasus dugaan suap Rp 12 triliun dan dilengkapi dokumen dan fakta konkret. "Ibaratnya maling te-

riak maling. Sehingga PPP tidak akan menoleransi lagi pada manuver Ahok ini. Saya ada bukti dan dokumen lengkap, tinggal dibuka saja nanti," tegas dia.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Zaenu-din mengatakan, prinsipnya setuju dengan hak angket. Tujuannya untuk mendudukan institusi dewan sesuai dengan undang-undang, terutama dalam melaksanakan fungsi budgeting.

"Namun untuk menjalankan hak angket ini fraksi golkar tidak bisa serampangan. Sebagai langkah lanjut dari proses ini, fraksi sebagai perpanjangan tangan partai akan konsultasi kepada DPD Partai Golkar DKI Jakarta dan DPP Partai Golkar," ungkap Zainudin.

Bagi Fraksi Golkar, sambung dia, hak angket digunakan ketika ada kondisi yang memaksa dan berdampak terganggunya kepentingan umum yang mengakibatkan pembangunan DKI tidak berjalan dengan baik.

"Faksi Golkar pun akan menelaah secara mendalam, apakah kepemimpinan Ahok nyata-nyata telah keluar dari rel konstitusi yang bisa saja berdampak politik dalam melaksanakan program pemerintah atau tidak," tegas Zainudin.

Hal serupa juga dilakukan Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas. "Kami hingga kini masih menunggu instruksi Muhaimin Iskandar selaku ketua umum. Jadi belum bisa bicara panjang soal hak angket ini," kata dia. (wok/pes)

- Perseteruan DPRD dengan Gubernur Ahok makin meruncing
- Sekda DKI Saefullah berkomitmen membela Gubernur Ahok
- Berkas APBD akan dikirim ke Mendagri dalam bentuk e-budgeting
- Dewan mempersiapkan bukti dokumen upaya suap Rp 12 triliun

GIMBAL/INDOPOS